



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PARIKHIN
2. Jabatan : PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
3. NHK : 111993

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.015.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m²/36 m² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
2. Tanah Seluas 150 m² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/36 m² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 122.500.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ETIOS VALCO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, HONDA ADV 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 30.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.950.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 93.900.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 60.673.952

Sub Total Rp. 1.303.023.952

III. HUTANG Rp. 249.900.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.053.123.952

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.